

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG PEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN
ANGGARAN 2018-2022**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : Dinda Aprilianti Pohan
NPM : 2005170111
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 01 Agustus 2024, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DINDA APRILIANTI POHAN
 N P M : 2005170111
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Irfan, S.E., M.M., Ph.D)

Penguji II

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Elizar Sinambela S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

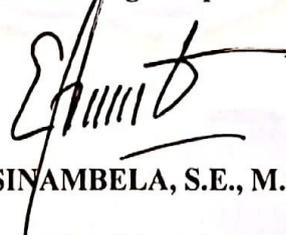
Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DINDA APRILIANTI POHAN
N.P.M : 2005170111
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN
ANGGARAN 2018-2022

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2024

Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E, M.M, M.Si, CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dinda Aprilianti Pohan
NPM : 2005170111
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-Perbaiki Bab I. pada definisi masalah	24/6-24	
Bab 2	-Perbaiki hipotesis		24/6-24
Bab 3	-Perbaiki sistematis penulisan Bab III		24/6-24
Bab 4	-Perbaiki Deskripsi Data -Perbaiki pembahasan		24/6-24
Bab 5	-Selesaikan hasil penulisan dan lengkapi skripsi	24/7-24	
Daftar Pustaka	-Selesaikan Daftar Pustaka dan Abstrak		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc. & tgl pada bidy Meja Hijau	24/7-2024	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, Juni 2024
Dosen Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : DINDA APRILIANTI POHAN
N.P.M : 2005170111
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN
ANGGARAN 2018-2022

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

DINDA APRILIANTI POHAN

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Dinda Aprilianti Pohan

Program Studi Akuntansi

Email: Dindaapriliantid@gmail

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis baik secara parsial maupun secara simultan pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB terhadap PAD Kab. Deli Serdang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran periode tahun 2018 – 2022. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, sumber data yaitu data primer yang bersumber dari kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Kemudian teknik analisis data menggunakan teknis analisis linear regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah (memiliki nilai T-Hitung $96,856 > T\text{-Tabel } 12, 71$ maka dapat disimpulkan H_A ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), kemudian Retribusi Daerah memiliki nilai T-Hitung $122,121 > T\text{-Tabel } 12, 71$ maka disimpulkan H_A ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD, dan untuk PDRB diperoleh T-Hitung $16,499 > T\text{-Tabel } 12, 71$ maka dapat disimpulkan H_A ditolak dan H_0 diterima. Selanjutnya hal ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan uji F diperoleh F-hitung sebesar $3,086 < F\text{-tabel } 10, 1$. Maka H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDRB secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan hal tersebut, saran yang diberikan penulis yaitu pemerintah daerah harus menerapkan strategi yang lebih baik, mengoptimalkan penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran Pajak Daerah, pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domesti Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRAK

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF DELI SERDANG REGENCY IN THE 2018-2022 FISCAL YEAR

Dinda Aprilianti Pohan

Program Studi Akuntansi

Email: Dindaapriliantid@gmail.com

The aim of this research is to analyze both partially and simultaneously the influence of Regional Taxes, Regional Levies and GRDP on District PAD. Deli Serdang. The sample used in this research is the budget realization report for the period 2018 - 2022. The data collection technique is through documentation, the data source is primary data sourced from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) office. Then the data analysis technique uses multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of data analysis, it can be concluded that partially Regional Tax (has a T-Count value of 96.856 > T-Table 12, 71), it can be concluded that HA is rejected and HO is accepted. This shows that Regional Tax has an effect on PAD (Regional Original Income), then the Regional Levy has a T-Count value of 122.121 > T-Table 12, 71, so it is concluded that HA is rejected and HO is accepted. This shows that the Regional Levy has an effect on PAD, and for GRDP it is obtained that T-Table is 16,499 > T-Table 12, 71. It can be concluded that HA is rejected and HO is accepted. Furthermore, this shows that GRDP has an effect on PAD. Based on the F test, F-count is 3.086 < F-table 10, 1. So Ha is accepted, thus it can be concluded that Regional Taxes, Regional Levy and GRDP simultaneously (together) influences PAD. Based on this, the advice given by the author is that regional governments must implement better strategies, optimize regional revenues in the form of regional taxes and levies, provide education to the public about the importance of paying regional taxes, Regional governments must prioritize community welfare in order to increase regional economic growth.

Keywords: Regional Tax, Regional Levy, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regional Original Income (PAD).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunian- Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022”, yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Pertama-tama dan yang paling utama penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya Kepada Ayahanda Samsori Pohan, Ibunda Sri Wahyuni Batubara, dan Adik- adik, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat memberikan banyak ilmu, bimbingan, masukan dan pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Sahabat saya yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Proposal ini. Amin YaRabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Juli 2024

Dinda Aprilianti Pohan
NPM. 2005170111

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.2 Pajak Daerah.....	15
2.1.3 Retribusi Daerah	18
2.1.4 PDRB	21
2.2 Kerangka Konseptual	27
2.3 Hipotesis.....	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.2.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)	32
3.2.3 Variabel Independen (Variabel Bebas).....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.4 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV	43
HASIL PENELITIAN	43
4. 1 Hasil Penelitian	43
4.1 .1 Deskripsi Variabel Data.....	43
4. 2 Analisis dan Pengujian Hipotesis	44
4. 2. 1 Uji Statistik Deskriptif.....	44
4. 2. 2 Uji Asumsi Klasik	45
4.2.4 Hipotesis	52
4.3 Pembahasan	56
4. 3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).....	57
4. 3.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	58
4. 3.3 Pengaruh Produk Domesti Regional Bruto PDBR Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60
4. 3. 4 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan PDRB (Product Domestic Regional Bruto) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)	61
BAB V	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5. 2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Gambar 4. 1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot.....	46
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data PAD, Pajak daerah, Retribusi daerah dan PDRB (ADHK) di Kabupaten Deli Serdang T.A 2018-202022 (dalam rupiah)	6
Tabel 2. 1	Kerangka Konseptual	24
Tabel 2. 2	Definisi Operasionialisasi Variabel.....	34
Tabel 3. 1	Waktu Penelitian	35
Tabel 4. 1	Data Anggaran PAD, Pajak daerah, Retribusi daerah dan PDRB (ADHK) di Kabupaten Deli Serdang T.A 2018-202022 (dalam rupiah)	44
Tabel 4. 2	Tabel Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 3	Hasil Uji Kolmogorov.....	47
Tabel 4. 4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4. 5	Uji Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4. 6	Hasil uji T	53
Tabel 4. 7	Hasil Uji F.....	54
Tabel 4. 8	Hasil Uji R Square	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu bagiannya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan pembatasan jenis pajak yang dimana 16 jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak BPHTB, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan. Pendapatan daerah adalah Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva/penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva/pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah (Sinambela, et all 2016).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang memiliki beraneka ragam sumber jasa yang dapat dikenakan pajak dan retribusi. Mulai dari Pajak dan Retribusi daerah, PDRB (Produk Domesti Regional Bruto) sampai dengan jumlah penduduk yang signifikan. Dari pajak daerah dan retribusi inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pilar utama dalam pendapatan suatu daerah di Indonesia. PAD berasal dari sumber penerimaan yang dihasilkan dari dalam wilayah daerah tersebut, bukan dari luar daerah. Komponen utama PAD melibatkan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai bentuk pendapatan daerah lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, PAD memainkan peran vital sebagai salah satu aset utama yang mendukung perkembangan daerah otonom (Dewi dkk, 2020). Priyono & Handayani (2021)¹ menegaskan bahwa keberadaan mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah otonom. PAD adalah sumber penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut (Raudhatinur & Ningsih, 2019). PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat (Horota dkk, 2017).

Menurut Harefa dkk (2017:29) dalam pemungutan PAD oleh pemerintah daerah, “pemerintah daerah harus menerapkan pengawasan dan pengendalian yang sistematis dan sistematis untuk melaksanakan pemungutan pajak dan bea daerah secara optimal, serta mencegah terjadinya penyelewengan. Potensi penerimaan PAD dapat digali semaksimal mungkin, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa dampaknya tidak mengganggu perekonomian masyarakat. .”

PAD dapat digunakan sesuai dengan niat dan prakarsa Pemerintahan daerah mempunyai manfaat dalam mengatur urusan daerah. Di sisi lain, sumber pendanaan berasal dari dukungan pemerintah pusat, dan umumnya diperuntukkan bagi pendanaan tertentu yang bersifat wajib. Oleh karena itu, wajar jika Untuk membiayai pembangunan dan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah daerah berupaya untuk memperoleh PAD yang sebesar-besarnya. Menurut Harefa dkk (2017:1) “secara rata-rata nasional, pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan opini lokal yang unik.”

Peranan wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan sangatlah penting. Orde Baru Melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah, terlihat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di Deli Serdang, dimana sektor pertanian dan perkebunan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah terus memberikan sinergi bagi pembangunan lebih lanjut Kabupaten Deli Serdang yang adil dan makmur.

Daerah otonom dituntut untuk menjadi pelaku dan fasilitator dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya untuk tujuan pembangunan daerah. Aktivitas pemerintah dalam menentukan sektor unggulan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah langkah strategis dalam pembangunan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah otonom sebagai motor penggerak perekonomian nasional (Mamondol, 2014)

Teori stewardship digunakan para peneliti untuk menguji para manajer dalam perusahaan sebagai pelayan (steward) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam pemerintahan dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat (Jatmiko & Wicaksono, 2019) .

Kaitannya dengan pendapatan asli daerah adalah dimana masyarakat itu dapat makmur dari segi infrastruktur maupun pendidikan yang dapat bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tidak lain juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat membayarkan bagian dari hasilnya kepada pemerintah. Pajak adalah kewajiban setiap individu untuk membayarkan sebagian hasil dari kekayaan kepada pemerintah. Kaitannya dalam penelitian ini adalah dimana pemerintahan dapat melayani masyarakatnya dengan baik. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan dana yang di dapatkan melalui bantuan dari pemerintah pusat dan kemandirian pemerintah daerah itu sendiri.

Kabupaten Deli Serdang telah memperkenalkan Peraturan Zonasi Nomor 2 tentang Pajak Daerah menggali potensi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membantu pegawai pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemerintah yang berfungsi dalam mengelola dan memantau sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah pajak yang diharapkan pendapatan daerah akan meningkat setiap tahunnya.

Peranan wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan sangatlah penting. Orde Baru Melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah, terlihat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di Deli Serdang, dimana sektor pertanian dan perkebunan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah terus memberikan sinergi bagi pembangunan lebih lanjut Kabupaten Deli Serdang yang adil dan makmur.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan otonomi daerah dan mendorong pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Pendapatan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah . Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, usaha daerah, pengelolaan aset daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Menurut Harefa (2017:1), Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (R. dan Dahrani, 2021). “secara rata-rata nasional, pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan opini lokal yang unik.” Berikut merupakan Data pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022;

Tabel 1. 1 - Data PAD, Pajak daerah, Retribusi daerah dan PDRB (ADHK) di Kabupaten Deli Serdang T.A 2018-2022 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi daerah	PDRB (ADHK)
2018	849.286.151.150,00	558.329.598.200,97	38.794.665.624,00	68.341,00
2019	820.404.456.406,75	652.563.113.786,79	34.182.703.026,25	71.878,69
2020	825.375.281.296,75	652.563.113.786,79	34.182.703.026,25	70.878,83
2021	4.568.731.781,00	21.692.359.275,00	337.223.100,00	72.173,62
2022	796.879.776.249,00	767.662.579.323,00	29.217.618.926,00	75.568,66

Sumber : Badan Pusat Statistik di Kab. Deli Serdang 2023

Fenomena itu ditunjukkan oleh tabel diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan setiap tahunnya. Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2021 PAD, Pajak daerah, Retribusi daerah mengalami penurunan. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Pajak Daerah di Kabupaten Deli Sedang mengalami kenaikan. Pencapaian pajak daerah paling tinggi terjadi di tahun 2022 berjumlah 767.662.579.323 dan yang paling rendah ditahun 2021 berjumlah 21.692.359.275. Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa apabila pajak daerah dan retribusi di suatu daerah mengalami peningkatan maka seharusnya PAD juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Dilihat dari realita tersebut, terlihat adanya indikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dalam hal pajak daerah dengan kaitannya terhadap pencapaian

Pendapatan Asli Daerah yang mengisyaratkan kurang optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Hal ini mengingat bahwa pajak daerah merupakan komponen penting dalam hal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial .

Sama hal dengan Retribusi daerah juga mengalami penurunan dari 4 tahun belakang , dengan pencapaian paling tinggi terjadi ditahun 2022 dengan nominal 38. 789. 665. 624 dan paling rendah terjadi di tahun 2021 dengan nominal 337. 223. 100. Realita yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan pola hubungan berbanding terbalik antara Pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Darwin (2010) dalam Damayanti (2023) Retribusi Daerah hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, retribusi daerah tidak seperti halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Memang dengan retribusi itu berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya,

sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Nilai Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup bervariasi, dan pada tahun 2018 sebesar 68.341,00 dan meningkat menjadi 75.567,66 pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2018 selalu mengalami akselerasi. Hingga tahun 2022 meningkat sebesar 13,9 persen selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Menurut Anggoro (2017:45) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana kedua variabel tersebut merupakan hubungan yang fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan otonomi daerah. Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari Badan Pendapatan berdiri sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang, namun pertumbuhan ekonominya belum begitu meningkat dibandingkan Kabupaten lainnya sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Anggaran yang dikeluarkan terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun berfluktuasi atau naik turun. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Kita ketahui memaksimalkan pendapatan daerah adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga perlu dilakukan pendataan yang akurat terhadap data-data pendukung untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah baik dari sisi belanja daerah maupun dana-dana yang diberikan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mesra B (2017) dengan judul jurnal “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Utara” yang memukakan hasil bahwa jumlah penduduk, pdbr, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Utara.

Penelitian ini sejalan dengan Ni Putu Ery (2014) dengan penelitian berjudul “ Analisis Efektifitas dan Kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD di Kota Denpasar Tahun 2009-2013” yang menemukan hasil bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2009-2013 dikatakan sangat efektif dengan presentase melebihi 100% dan tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD pada tahun 2009-2013 dikatakan kurang dengan presentasi 100%

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rianti Rezki (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi” yang mengemukakan hasil bahwa apabila PBRD naik 1% maka PAD akan meningkat , sebaliknya jika PDBR turun maka PAD juga menurun.

Dari penelitian dan pendapat para ahli tentang Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam, karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak daerah mengalami kenaikan yang signifikan sementara PAD mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2. Retribusi daerah mengalami penurunan diikuti dengan PAD yang menurun juga.
3. Terjadi fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2018-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam

1. Bagaimana pengaruh pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022?

2. Bagaimana pengaruh Retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan PDRB terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Pajak daerah, PDRB terhadap PAD Tahun Anggaran 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis PDRB terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis Hasil penelitian ini tentang pengaruh Pajak Daerah dan PDRB terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Deli Serdang, peneliti dapat memperluas ilmunya dan pengertian.
2. Penerapan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemerintahan, khususnya mengenai pengaruh Pajak daerah dan PDRB dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Deli Serdang menambah kabupaten pada tahun anggaran 2018-2022.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari wilayah administratifnya sendiri. PAD mencakup berbagai jenis pendapatan yang dihasilkan atau dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan dan memberikan pelayanan publik di tingkat daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari berbagai pajak yang sah dikelola oleh pemerintah. Pendapatan yang diperoleh akan dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak daerah dapat digunakan untuk mendanai APBD itu sendiri. Dengan meningkatkan pendapatan awal daerah, ketergantungan struktur daerah terhadap dukungan keuangan pusat untuk pembangunan menjadi berkurang. Pasal 33 Tahun 2004 tentang Kompensasi Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa dalam Pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan kesepakatan daerah berdasarkan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah (Halim dalam Asmuruf dkk, 2015).

Pembentukan UU No. 33 Tahun 2004 dimaksudkan “untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah“. Pendanaan tersebut menganut prinsip *follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Menurut Siahaan (2013:14), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a) Pajak daerah,
- b) Retribusi daerah,
- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
- d) Lain-lain PAD yang sah “.

Sedangkan Menurut Harefa dkk (2017: 11), “Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan instansi pemerintah, pajak daerah, bagi hasil BUMD, pajak daerah dan pendapatan lain-lain BPS Kabupaten Deli Serdang. Otonomi daerah

memungkinkan setiap daerah menetapkan dan mengelola anggarannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, sehingga memaksimalkan PAD dan mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Mencapai kesetaraan. Pendapatan negara dari PAD nantinya digunakan untuk mendanai pengelolaan dan pembangunan pemerintah daerah. PAD Semakin banyak dana yang diterima pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula perkembangan ekonomi daerah tersebut. Dalam hal ini terlihat pada penyediaan prasarana dan sarana pendukung masyarakat seperti penerangan jalan, jalan raya, dan bangunan umum.

Menurut teori Darise dalam Harefa dkk (2017:81) “pelaksanaan fungsi pemerintah daerah paling baik dilaksanakan apabila tersedia sumber daya keuangan yang memadai menyusul penyelenggaraan urusan negara.” Pemerintah daerah, pusat pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004”.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, lawenforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai perwujudan desentralisasi, memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Untuk meningkatkan PAD, daerah dilarang

- a) mengambil peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi;
- b) Menetapkan pengendalian pendapatan daerah yang menghambat perpindahan penduduk, perpindahan barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan impor dan ekspor.

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Indikator Pendapatan Asli Daerah

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah suatu daerah, yaitu :

1. Faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari Investasi, Inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan
2. Faktor internal dari saran dan prasarana, intensif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan..

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut (Fitriani Saragih, 2023) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar bagi kelangsungan pembangunan negara kerana pajak mempunyai peranan penting termasuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo dalam Azhar (2021) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masingmasing. Menurut Halim dalam Nooraini dan Yahya (2018), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, maka ditegaskan bahwa penempatan beban rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang. Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat), misalnya pajak atas penghasilan tidak boleh dipungut oleh daerah karena telah dipungut oleh pemerintah pusat. Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 18

Tahun 1997 (UU PDRD) pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain meliputi:

- a) Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah tersebut.
- b) Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah.
- c) Opsen atas pokok pajak kekayaan (Ordonasi Pajak Kekayaan 1932).
- d) Opsen atas pajak penjualan bensin (Pasal 13 UU No. 1/1957).

2.1.2.2 Hubungan Pajak Daerah Terhadap PAD

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Pajak juga daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Tarif atau user charges atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu ada pula yang mendefinisikan user charges sebagai beneficiary charges, dimana didefinisikan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah.

Menurut (Syahputra, 2010) dalam Ananda Rizky (2020) , secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi daerah menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 retribusi daerah sebagai pembiayaan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau lembaga. Retribusi dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yaitu sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa umum yaitu pelayanan yang di sediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi umum yaitu sebagai berikut :

- 1) Retribusi Layanan Umum
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil
- 4) Retribusi Pelauanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kaku
- 11) Retribusi pengelolaan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah
- 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan

- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi terminal
 - 5) Retribusi tempat khusus parkir
 - 6) Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
 - 7) Retribusi rumah potong hewan
 - 8) Retribusi pelayanan pelabuhan
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - 10) Retribusi penyebrangan air
 - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yakni sebagai berikut :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

2.1.2.3 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa retribusi pada umumnya merupakan komponen dari sumber pendapatan bagi PAD setelah adanya pajak daerah. Bahkan besarnya retribusi daerah dapat melampaui besarnya pajak daerah. Retribusi daerah dengan pajak daerah memiliki perbedaan karakteristik, dimana retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah atas

adanya pemanfaatan jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga pembayar retribusi dapat menikmati imbalan secara langsung berupa jasa yang dipakai.

Menurut Regina (2017) Kontribusi Retribusi daerah dalam komponen PAD mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah retribusi daerah yang ditarik mengalami kenaikan maka jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh juga akan meningkat.

2.1.4 PDRB

2.1.4.1 Pengertian PDRB

Menurut Todaro dalam Lumy (2018) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian ditingkat daerah baik yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk daerah lain yang bertempat tinggal didaerah tersebut. Menurut publikasi oleh Badan Pusat Statistik (2020) ukuran parameter sangat penting dalam melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yaitu menggunakan data PDRB, sedangkan dalam melihat kondisi ekonomi di daerah tersebut dapat menggunakan berdasarkan harga berlaku ataupun berdasarkan harga konstan yang pada intinya PDRB merupakan suatu nilai tambah (value added) yang dihasilkan seluruh unit

ekonomi. Menurut Kuncoro (2015) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kegiatan perekonomian yang diperoleh dari suatu daerah dengan melihat kuantitas nilai tambah yang didapatkan dari seluruh unit usaha dan jasa di suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menerapkan total seluruh nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan dari seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah.)

PDRB menurut atas dasar harga berlaku memiliki fungsi untuk memperkirakan keadaan pola ekonomi pada suatu tahun, sehingga dalam mengukur tingkat pertumbuhan dalam mencapai kapasitas produksi atau kelanjutan produktivitas secara nyata identifikasi pengaruh atas perubahan harga harus dihilangkan melalui perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perkiraan atas dasar harga konstan dapat memiliki manfaat untuk agenda ekonomi, melihat proyeksi, dan mengkalkulasikan total pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sedangkan dalam PDRB per kapita merupakan suatu hasil dari nilai tambah yang dibuat penduduk melalui kegiatan yang di produksi. Jumlah PDRB per kapita didapat dari perhitungan antara total PDRB dengan jumlah penduduk dalam pertengahan tahun. PDRB per kapita memiliki manfaat dalam setiap peranannya sebagai bentuk upaya dalam menghitung kualitas kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Semisal data yang ditampilkan dengan secara periodic maka akan melihat tren perubahan pada tingkat kesejahteraan.

2.1.4.2 Perhitungan PDRB

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka dalam Produk Domestik Regional Bruto yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran.

a) Pendekatan Produksi Menurut Pendekatan Produksi ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam waktu satu tahun). Menurut Badan Pusat Statistik (2017), unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estate
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa Lainnya

2.1.4.3 Hubungan PDRB Terhadap PAD

Menurut Anggi Maharani (2019) Pelaksanaan otonomi melalui desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB yaitu dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan PAD dan PDRB merupakan akses dari pertumbuhan.

Sedangkan menurut Sukirno (2003 : 33) dalam Rani (2021) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah yang diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah yang di gambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut.

Berikut merupakan peneliti terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Analisis factor factor yang mempengaruhi	- Variabel dependen: PAD - Variabel	Berdasarkan hasil kajian , menemukan hasil bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan

	pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra Utara, (2017).	independen: jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah.	pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Utara.
2	Analisis Determinan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tanjung Balai	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen: PAD - Variabel independen: Pertumbuhan tingkat penduduk, PDRB, bantuan pemerintah dan hasil pendapatan asli daerah tahun sebelumnya 	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan data dan analisa penulis, terdapat hubungan antara hasil laju pertumbuhan penduduk, PDB, dukungan pemerintah pusat dan opini daerah. Daerah Tahun Sebelumnya , Pendapatan Asli Daerah , Saat Ini .
3	Analisis Faktorfaktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Jaya & Widanta (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen: PAD - Independen : Jumlah Wisatawan, PDRB Jumlah, Penduduk. 	Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.

4	<p>Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016 Dewi Silfa Fina (2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VARIABEL Dependen PAD - Variabel Independen: Jumlah Penduduk, Pajak dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah. 	<p>Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan negatif, pajak dan retribusi daerah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.</p>
5	<p>Analisis factor factor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Miragustia Mayza (2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variable Dependen PAD - Variable Independen: jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah. 	<p>Hasil berdasarkan uji f bahwa variable jumlah penduduk, rasio (PDRB) secara bersama-sama mempengaruhi PAD. Sedangkan uji t menunjukkan hasil bahwa variable jumlah penduduk tidak berpengaruh pada PAD . namun rasio pengeluaran (pengeluaran pemerintah/PDBR)berpengaruh terhadap PAD.</p>
6	<p>Monalisah Harahap (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variable Dependen PAD - Variable Independen : pajak daerah, dan retribusi 	<p>Berdasarkan hasil uji secara parsial (t) variabel penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera utara 2015-</p>

	an, 2020)	daerah	2018.Sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera utara tahun 2015-2018.
7	Rukmi Juwita dan Annisa Widia (Jurnal Akuntansi Keuangan Politeknik Pos Indonesia, 2022)	- Variable Dependen PAD - Variable Independen : Produk Domesti Bruto.	Hasil pengelolaan menggunakan uji t yang menunjukkan nilai thitung > ttabel (-1,530 > -2,042) yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap 34 Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat.
8	Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (Jurnal FEB Universitas Udayana, 2020)	- Variable Dependen PAD - Variable Independen: Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.	Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dengan menggunakan uji F diperoleh nilai F hitung 44,825 > F tabel 3,98 dengan nilai signifikansi P value 0,000 < 0,05. Hasil ini menerangkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2.2 Kerangka Konseptual

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen / terikat dan variabel independen / bebas. Variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, Variabel independen terdiri atas tiga yaitu: Variabel Independen (X1) adalah pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang,

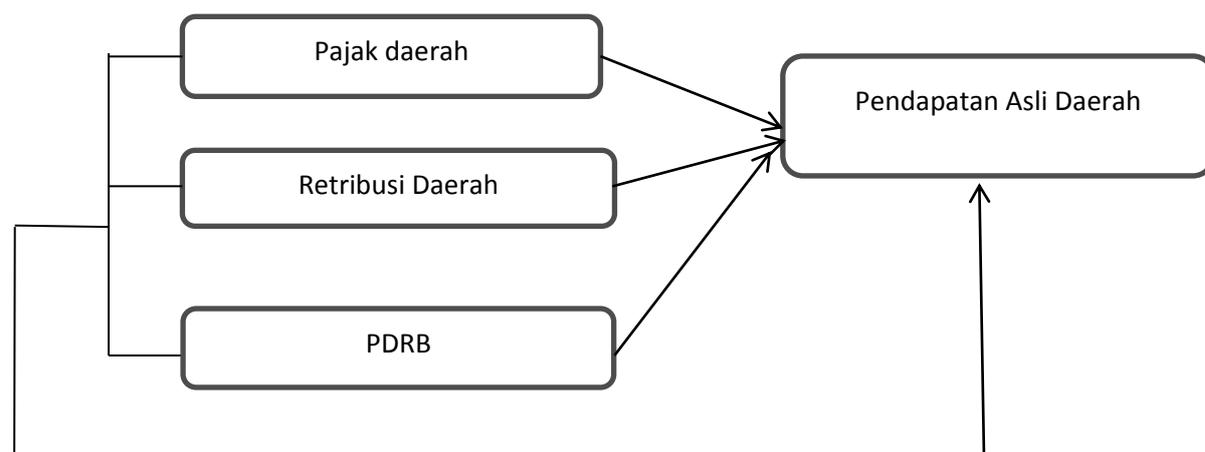
Variabel Independen (X2) adalah Retribusi Daerah, Variabel Independen (X3) adalah PDRB Kabupaten Deli Sedang Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Sumatera Utara. Data di ambil dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018-2022.

1. Pajak adalah salah satu sumber utama PAD. Pajak dapat mencakup berbagai jenis, seperti pajak penghasil, pajak peoperti dan konktaksi, pajak pertambahan nilai (PPN). Penerimaan pajak yang baik dapat meningkatkan PAD karena pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha. Contoh pajaknya antara lain pajak parkir, pajak pasar, atau pajak izin mendirikan bangunan (IMB). Pendapatan kompensasi juga menjadi penyumbang PAD yang cukup besar.
2. Retribusi daerah Retribusi daerah dalam komponen PAD mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah retribusi daerah yang

ditarik mengalami kenaikan maka jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh juga akan meningkat.

3. PDRB adalah Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Deli Serdang atas dasar harga konstan. Satuan dalam juta rupiah. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 - 2022.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan untuk memperjelas antar variable berikut disajikan lerangka konseptual seperti terlihat pada gambar 2.1:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan dari pengamatan dan penelitian permasalahan yang telah terjadi diatas maka peneliti mengemukakan dengan sementara (hipotesis) yaitu:

1. Pajak daerah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang
2. Retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang
3. PDRB berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang
4. Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana situasi dan peristiwa disusun dan dideskripsikan secara sistematis dan faktual serta akurat. Menurut Mukhtar (2013) “metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitin pada satu waktu tertentu”. Kemudian peneliti mendefenisikan serta memformulasikan masalah peneliti dengan jelas sehingga mudah dimengerti. Menurut waktu pengumpulannya penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*).

Penelitian deskriptif juga menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian serta memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang ada. Analisis deskriptif juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara mandiri masing-masing dari data variabel penelitian (Sinambela, 2021).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasionalisasi merupakan indikasi bagaimana mengukur suatu variable, dimaksudkan untuk menunjukkan signifikansi variable yang digunakan

dalam penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian selanjutnya. Berikut variable penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel Terikat atau variable dependen sering disebut sebagai variable kriteria. Variabel terikat menjadi perhatian dan sasaran utama dalam penelitian. Melalui analisis terhadap variable terikat akan mendapatkan solusi atas pemecahan masalah (Suharso, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari wilayah administratifnya sendiri. PAD mencakup berbagai jenis pendapatan yang dihasilkan atau dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan dan memberikan pelayanan publik di tingkat daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari berbagai pajak yang sah dikelola oleh pemerintah. Pendapatan yang diperoleh akan dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas atau variabel independent sering disebut sebagai variabel predictor. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif atau negative (Suharso, 2009). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Daerah

Menurut Halim (2014), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya

untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3. Produk Domesti Regional Bruto

Menurut Todaro dalam (Lumy dkk, 2018) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian ditingkat daerah baik yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk daerah lain yang bertempat tinggal didaerah tersebut.

Tabel 2. 2 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variable	Definisi	Indikator	Skala
Pajak daerah (X1)	Pemerintah daerah sering kali menggabungkan pendapatan pajak, bersama dengan sumber pendapatan lainnya, untuk memndanai berbagai proyek dan program yang diperlukan bagi kesejahteraan lokal. Pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan. 6. Pajak Parkir 	Rasio
Retribusi Daerah (X2)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu 	Rasio
PDRB (X3)	Pendapatan jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah	Data PDRB dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Deli Serdang	Rasio

	penduduk dalam jangka waktu tertentu.		
Pendapatan asli daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal.	Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.	Rasio

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang. Periode penelitian direncanakan mulai Januari 2024 sampai dengan Mei 2024. Proses penelitian akan disajikan pada tabel 3.1:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	2023/2024																			
	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Pembuatan Proposal		■	■	■	■															
Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■														
Seminar Proposal							■													
Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

Data Diolah Penulis

3.4 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiyono (2017) pada dasarnya ukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan besarnya sampel tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan cara statistik ataupun besarnya estimasi penelitian. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa sampel yang dipilih harus representatif (mewakili) artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang di pilih. . Sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 sampel yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 380 Desa dari tahun 2018-2022. Adapun Kecamatan yang menjadi tempat penelitian ini adalah Sibolangit, Pancur Batu, Kutalinbaru, Sunggal, Hamparan Perak, Pelabuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, Beringin, Agar Merbau, Lubuk Pakam, Galang, Bangun Purba, Gunung Meriah, Sinembah Tanjung Mudahulu, Sinembah Tanjung Mudahilir, Tanjung Morawa, Patumbak, Sibiru biru, Deli Tua, dan Manorambe.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua, dengan cara perolehan datanya terdiri dari berbagai sumber seperti dari sumber perusahaan, lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui laporan-laporan, publikasi atau dokumen. Data yang digunakan peneliti adalah data panel, karena data penelitian yang diperoleh merupakan kombinasi antara data *Cross Section* atau data di satu waktu tertentu yang disandingkan dengan data time series atau data runtut waktu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang di laman websitenya <https://deliserdangkab.bps.go.id/> mulai tahun 2018 sampai 2022. Dimana data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dalam penelitian ini materi diperoleh dari sasaran dan laporan pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta laporan pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Arikunto (2010:201), “metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2010:198) adalah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari telewawancara(interview)”.

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih dari dua terhadap variable dependen (Y). Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variable dependen digunakan redresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

Menurut Sugiyono(2017:277), “analisi regresi berganda digunakan unruk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variable dependen (kriterium), bila dua lebih variable independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunnya nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variable independennya minimal 2 (dua)”.Persamaan analisis regresi linear berganda secara umum dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Variabel PAD

a = Konstanta

b1 = Koefisien regrasi Variabel x1

b2 = Koefisien regresi Variabel x2

b3 = Koefisien regresi Variabel x3

x1 = Variabel Pajak Daerah

x2 = Variabel Retribusi Daerah

x3 = Variabel PDRB

e = error / Variabel tidak diteliti

Syarat yang mendasari metode regresi berganda adalah terpenuhi semua asumsi klasik, agar hasil pengujian tidak bias. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:

a) Uji Normalisasi

Pengujian normalisasi bertujuan untuk memeriksa apakah dalam regresi terdapat variable pengganggu atau variable residu berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui uji T dan uji F mengasumsikan residu mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, uji statistic tidak akan valid untuk sampel kecil. Rephrase ada dua cara untuk mendeteksi apakah residu berdistribusi normal, yaitu dengan analisis grafis dan pengujian pengujian statistik.

b) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antar variable independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak ada korelasi antar variable independennya. Jika variable independen berkorelasi, maka variable tersebut tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable bebas yang nilai korelasi antar variable bebasnya adalah nol.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value atau menggunakan Variance Inflation Factors (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai $VIF \geq 10$ dan tolerance value $\leq 0,10$ dan sebaliknya multikolinearitas tidak terjadi apabila $VIF \leq 10$ dan tolerance value $\geq 0,10$.

c) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat ketimpangan varians antara residu observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya

konstan yaitu maka dikatakan homoskedastisitas dan jika bervariasi maka disebut heterogenitas, jika tidak maka tidak akan terjadi heterogenitas. Pengujian heterogenitas dapat diuji dengan dua cara yaitu:

1) Grafik Pot:

Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik pot adalah sebagai berikut:

- a. Jika pola tertentu seperti titik-titik membentuk pola tertentu dengan keteraturan (bergelombang, mengembang kemudian menyusut), maka hal ini menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada trend yang jelas dan titik-titik tersebut terletak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada terjadi heteroskedastisitas.

2) Uji Glejser

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterogenitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk sisa absolut sebesar pada variable independen dengan menggunakan persamaan regresi:

$$| U_t | = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variable independen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variable independen maka terdapat indikasi bahwa terjadinya heteroskedastisitas dan apabila probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t) dan penyajian secara simultan (Uji F).

a. Uji secara Parsial/ Individul (Uji t)

Uji parsial atau uji-t adalah untuk menguji apakah suatu variable bebas berpengaruh secara individu terhadap variable terikatnya. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

H₀₁ : $b_i = 0$ (Pajak daerah, Retribusi Daerah dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022).

H_{a1} : $b_i \neq 0$ (Pajak daerah, Retribusi Daerah dan PDRB secara parsial berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022).

Kemudian dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan taraf signifikansi (α) $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan ($n-k$) dengan t_{hitung} yang diperoleh:

Terima H₀ bila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Tolak H₀ (Terima H_a) bila $t_{hitung} > t_{tabel}$

b. Uji secara Simultan/ Serempak Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (serempak) terhadap variable terikat.

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

H₀₁ : 0 (Pajak daerah, Retribusi Daerah dan PDRB secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022).

Ha1 : $b_i \neq 0$ (Pajak daerah, Retribusi Daerah dan PDRB secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022).

Pengaruh variable independen terhadap dependen di uji tingkat kepercayaan (confidence interval) 90% atau pada (alpha) $\alpha = 5\%$. Untuk menguji apakah hipotesis ditolak atau diterima digunakan statistic uji F:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dan

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variansi dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variable independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Sebaliknya nilai mendekati 1 berarti variable independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variable dependen. Penentu tersebut dapat dinyatakan dengan rumus setelah:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

D : Koefisien Determinasi

R^2 : Koefisien korelasi variable bebas dengan variable terikat

100% : Presentasi Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1 .1 Deskripsi Variabel Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dari laporan realisasi anggaran tahun 2018 – 2022. Objek dalam penelitian ini ialah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 - 2022. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 sampel yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 380 Desa dari tahun 2018-2022. Adapun Kecamatan yang menjadi tempat penelitian ini adalah Sibolangit, Pancur Batu, Kutalinbaru, Sunggal, Hampan Perak, Pelabuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, Beringin, Agar Merbau, Lubuk Pakam, Galang, Bangun Purba, Gunung Meriah, Sinembah Tanjung Mudahulu, Sinembah Tanjung Mudahilir, Tanjung Morawa, Patumbak, Siburu biru, Deli Tua, dan Manorambe;, adapun data yang diambil yaitu:

- a) X_1 = Pajak Daerah
- b) X_2 = Retribusi Daerah
- c) X_3 = PDRB (Product Domestic Regional Bruto)
- d) Y = Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini disajikan tabulasi dari Pajak Daerah , Retribusi Daerah, PDRB Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data Anggaran PAD, Pajak daerah, Retribusi daerah dan PDRB (ADHK) di Kabupaten Deli Serdang T.A 2018-2022 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi daerah	PDRB (ADHK)
2018	849. 286. 151. 150,00	558. 329. 598. 200,97	38. 794. 665. 624,00	68. 341,00
2019	820. 404. 456. 406,75	652. 563. 113. 786,79	34. 182. 703. 026, 25	71. 878, 69
2020	825. 375. 281. 296,75	652. 563. 113. 786,79	34. 182. 703. 026, 25	70. 878, 83
2021	4. 568. 731. 781,00	21. 692. 359. 275,00	337. 223. 100,00	72. 173, 62
2022	796. 879. 776. 249,00	767. 662. 579. 323,00	29. 217. 618. 926,00	75. 568, 66

Sumber: Badan Pusat Statistik

4. 2 Analisis dan Pengujian Hipotesis

4. 2. 1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) serta variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Tabel Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PAD	6.5930E+11	3.66480E+11	5
Pajak Daerah	5.3056E+11	2.93983E+11	5
Retribusi Daerah	2.7343E+10	1.54720E+10	5
PDRB	71768.1600	2605.60686	5

Sumber : Hasil diolah, 2024

4. 2. 2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

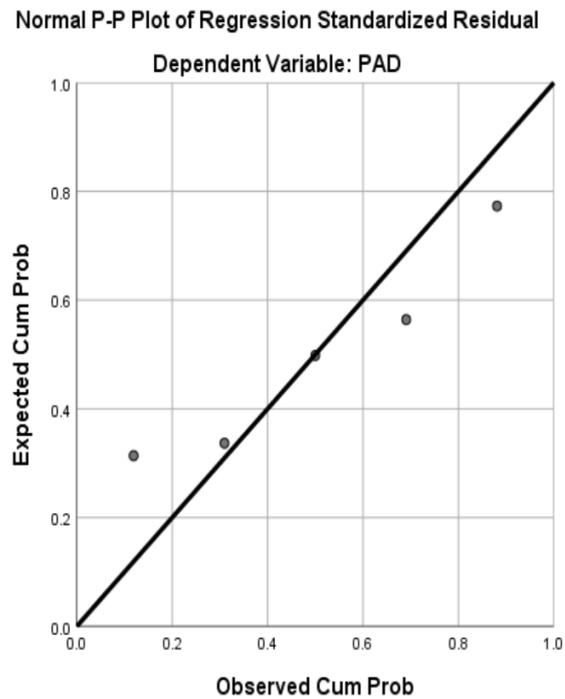
4. 2. 2. 1 Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat grafik histrogra dan gambar normal P-Plot. Pada grafik histrogram, data dinyatakan berdistribusi normal, bila bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung berimbang, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri, dan kurva hampir menyerupai bentuk lonceng yang hampir sempurna. Sedangkan pada gambar normal P-Plot, data dinyatakan normal bila gambar terdistribusi dengan titik-titik. data searah mengikuti. Dalam menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas digunakan 2 cara antara lain sebagai berikut :

a. P-Plot Regression

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot berikut ini:

**Gambar 4. 1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot
Regression Standardized Residual**



Sumber : Data diolah, 2024

Pada gambar 4.1 hasil dari pengaruh normalitas data menunjukkan bahwa pada grafik normal plot terlihat titik – titik menyebar mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal, sehingga layak digunakan.

b. Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov
Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000440
	Std. Deviation	120439678.99202238
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.200
	Negative	-.166
Test Statistic		.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai K-S variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah telah berdistribusi secara normal karena masing – masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym.Sig.* (2-tailed). Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig.* (2-tailed) > 0,05. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

4. 2. 2.2 Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan dalam suatu penelitian yang memiliki variable independen lebih dari satu. Hal ini untuk mengetahui apakah didalam

suatu model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen. Dengan uji asumsi klasik statistik, multikolinearitas dapat dideteksi dari output SPSS pada tabel *coefficients* dan tabel *collinearity diagnostics*. Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3888375650.77	8402245718.803		-2.161	.276		
	Pajak Daerah	-.002	.001	-8.799	-2.095	.284	.005	195.000
	Retribusi Daerah	.044	.020	9.824	2.262	.265	.005	208.492
	PDRB	116855.482	54078.936	4.357	2.161	.276	.022	44.950

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil diolah SPSS

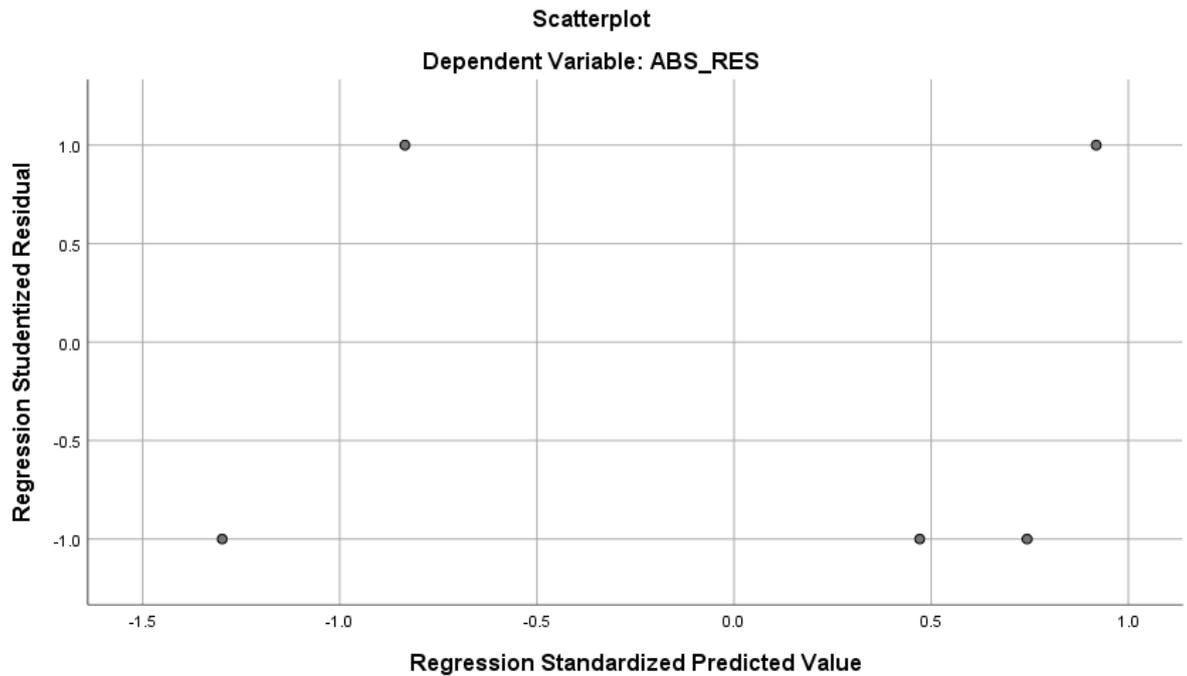
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas masalah karena *VIF* (*Variabel Inflation Factory*) lebih kecil dari 10 yaitu pada VIF Pajak Daerah sebesar 195,000 > 10 , Nilai VIF Retribusi Daerah sebesar 208,492 dan Nilai VIF pada PDRB sebesar 44, 950 > 10 .

4. 2. 2. 3 Uji Heteroskedastisitas

Menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan keperiode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksikan dengan *studentized deleted residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot. pada model regresi berganda tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan bawah atau sekitar angka 0 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS

Gambar 4.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4. 2. 3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDBR (Produk Domesti Bruto) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ABD = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

ABD = Nilai yang di prediksi X1 = Pajak Daerah

α = Konstanta X2 = Retribusi Daerah

b = Slope atau koefisien regresi X3 = PDRB .

Tabel 4. 5 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	356950460219.737	22282573030.666		16.019	.040		
	Pajak Daerah	.554	.006	.444	96.856	.007	.005	195.000
	Retribusi Daerah	13.726	.112	.579	122.121	.005	.005	208.492
	PDRB	-5113078.632	309902.628	-.036	-16.499	.039	.022	44.950

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Data Pengelolan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta (nilai a) sebesar 356950460219,737 kemudian untuk nilai Pajak Daerah (nilai β_1) sebesar 0,554 dan Retribusi Daerah (β_2) sebesar 13. 726 serta PDRB (β_3) sebesar-5113078.632. Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 356950460219.737 + 0.554X_1 + 13.726X_2 - 5113078.632X_3$$

Atau

$$PAD = 356950460219.737 + 0.554X_1 + 13.726X_2 - 5113078.632X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 356950460219.737 menunjukkan bahwa jika variabel independent yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB sama dengan nol maka PAD adalah sebesar 356950460219.737 .
- b. Nilai koefisien Pajak Daeah sebesar 0, 554 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Pajak Daerah maka Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 0, 554.
- c. Nilai koefisien Retribusi Daerah sebesar 13.726 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 13.726.
- d. Nilai koefisien regresi PDRB sebesar (- 5113078.632) menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan PDRB maka Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar (-5113078.632).

4.2.4 Hipotesis

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial, bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDRB) terhadap variabel dependen (PAD). Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Pengujian ini menggunakan kriteria jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak atau variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, atau variabel

bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan :

Tabel 4. 6 Hasil uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	356950460219.737	22282573030.666		16.019	.040
	Pajak Daerah	.554	.006	.444	96.856	.007
	Retribusi Daerah	13.726	.112	.579	122.121	.005
	PDRB	-5113078.632	309902.628	-.036	-16.499	.039

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS

Signifikansi uji T < signifikansi probabilitas 0.05

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Nilai t tabel untuk $n = 5 - 3 = 1$ adalah 12,71 .Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k), dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau $\alpha = 5\%$. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Pajak Daerah diperoleh T-Hitung 96,856 > T-Tabel 12, 71 maka keputusannya adalah H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Variabel Retribusi Daerah diperoleh T-Hitung 122,121 > T-Tabel 12, 71 maka keputusannya adalah H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil

menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 3) Variabel PDRB diperoleh T-Hitung 16,499 > T-Tabel 12, 71 maka keputusannya adalah H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh terhadap PAD

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (PAD). Pengujian ini menggunakan kriteria jika $p\text{-value} <$ dari *level of significant* yang ditentukan maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, atau dapat melihat nilai F. Jika nilai F hitung > F tabel maka secara bersamaan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Ftabel dapat dihitung dengan cara $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel dependen dan independen.

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537231552912765700000000.00	3	179077184304255250000000.0000	3.08632	.000 ^b
	Residual	58022865023475040.000	1	58022865023475040.000		
	Total	537231610935630740000000.00	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS

Signifikansi uji F < signifikansi probabilitas 0.05

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,086 sedangkan Ftabel sebesar 10, 1 maka Fhitung < Ftabel. Kemudian P-value $0,000 < 0,05$ artinya signifikan. Maka H_a diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel X1 (Pajak Daerah), X2 (Retribusi Daerah) dan X3 (PDRB) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.4. 3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (variabel pajak daerah, retribusi daerah dan PDRB) menjelaskan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) atau untuk mengetahui besar presentase variasi variabel terikat yang dijelaskan pada variabel bebas, maka dicarilah nilai R^2 (R square). Dalam output SPSS, jika koefisien determinasi berkisar antara nol maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan lemah. Jika angka lebih mendekati satu maka dinyatakan hubungan antara kedua variabel dinyatakan sangat kuat. Berikut ini hasil SPSS yang menggambarkan tentang nilai (R^2) pada penelitian ini.

Tabel 4. 8 Hasil Uji R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.306	.278	2.408793
a. Predictors: (Constant), PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah				
b. Dependent Variable: PAD				

Sumber : Hasil Pengeloaan SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai R Square adalah 0,306. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Anggaran Belanja Daerah maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100 \% \\
 &= 0,5532 \times 100 \% \\
 &= 30,6 \%
 \end{aligned}$$

Nilai R-Square diatas adalah sebesar 30,6 % hal ini berarti bahwa 30,6 % variasi nilai Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh peran dari variasi nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah Produk Regional Bruto (PDRB) . Dengan kata lain kontribusi Pajak Daerah, Retrubusi Daearah dan PDRB dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 30,6% sedangkan sisanya 69,4% adalah dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel yaitu: Pajak Daerah , Retribusi Daerah, PDRB (Product Domestic Regional Bruto) terhadap PAD

(Pendapatan Asli Daerah) dengan data berupa laporan keuangan periode 2018 - 2022. Hasil menunjukkan bahwa besarnya nilai anggaran PAD dipengaruhi oleh Pajak Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pengolahan data yang terkait dengan judul, kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya. Berikut adalah hasil pembahasan penelitian ini:

4. 3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, pajak daerah adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, dimana jika penerimaan pajak daerah meningkat maka penerimaan pendapatan daerah juga ikut meningkat, mengingat bahwasanya pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menetapkan adanya pajak daerah dalam peraturan daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana pendapatann pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai pengaruh antara Pajak Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung dan t tabel signifikansi hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung dibandingkan nilai t tabel yaitu $96,856 > 12,71$ dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1

diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman, yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar t tabel yaitu $39.837 > 2.00247$ dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 yaitu 0,000.12 Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada obyek penelitian data yang didapat dari Kota Bandung periode tahun 2011-2015.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Silfa Fina pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa variabel Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho (2014) yang menyebutkan bahwa variabel pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

4. 3.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang

pada umumnya bersifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai pengaruh antara Retribusi Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung dan signifikansi masing – masing sebesar 122,121 dan 0,005. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung dibandingkan nilai t tabel yaitu $122,121 > 12,71$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan teori yang ada menurut Made Krisna dan Ni Gusti Putu dalam Meilda dalm Sri, menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Dan untuk mengoptimalkan perolehan retribusi daerah, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam membayar retribusi, serta diharapkan bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kusuma Wardana, yang menyatakan bahwa retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah di

Kabupaten Gunungkidul. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien $4.452 > 1.67772$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kususma Wardana dengan penelitian yang sekarang terletak pada variabel dependennya, dimana variabel dependen peneliti adalah PAD sedangkan variabel dependen Dimas adalah Retribusi Daerah.

4. 3.3 Pengaruh Produk Domesti Regional Bruto PDBR Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional tertentu, yang dihitung berdasarkan harga konstan dan diukur dengan satuan rupiah. PDRB adalah salah satu indikator yang dijadikan sebagai gambaran pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan, struktur ekonomi serta keberhasilan pembangunan perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB setiap tahunnya, jika PDRB setiap tahunnya meningkat maka tingkat pendapatan perkapita masyarakat ikut meningkat begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung dan signifikansi masing – masing sebesar 16,499 dan 0,111. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung dibandingkan nilai t tabel yaitu $16,499 > 12,71$ dan nilai signifikansi $0,39 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa H_0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miragustia Mayza dkk, yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 5.090 dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.6 Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Migustia Mayza dkk dengan penelitian sekarang adalah tempat penelitian di Provinsi Aceh dan pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi dengan program shazam. Hasil penelitian ini berbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Fauzi Prawira (2016) yang meneliti tentang pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta . Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

4. 3. 4 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan PDRB (Product Domestic Regional Bruto) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan data diatas mengenai Pajak Daerah, Retribusio Daerah , PDRB (Product Domestic Regional Bruto) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y (PAD).

Hasil penelitian ini memberikan kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Halim pada bukunya, yang dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi besar kecilnya PAD. faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor kebijakan dan kelembagaan yang meliputi perubahan peraturan, pengadaan pembangunan baru, sumber pendapatan baru, pajak serta retribusi daerah. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi yang meliputi produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD 22 Kecamatan di Kabupaten pada tahun 2018-2022 dengan nilai probabilitas sebesar $T\text{-Hitung } 96,856 > T\text{-Tabel } 12,71$. Artinya, apabila Pajak Daerah mengalami kenaikan, maka Penerimaan Pendapatan juga akan mengalami kenaikan. hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah tersebut, jika nilai Pajak Daerah semakin tinggi, maka semakin banyak pula realisasi Penerimaan Pendapatan yang didapat. Dengan bertambahnya pendapatan, dapat mendorong kualitas peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD 22 Kecamatan di Kabupaten pada tahun 2018-2022 dengan nilai probabilitas sebesar $T\text{-Hitung } 122,121 < T\text{-Tabel } 12,71$, Yang artinya Retribusi Daerah mengalami kenaikan maka penerimaan PAD akan mengalami kenaikan.
- 3) Variabel Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

PAD 22 Kecamatan di Kabupaten pada tahun 2018-2022 dengan nilai probabilitas T-Hitung $16.499 < T\text{-Tabel } 12, 71$.

- 4) Berdasarkan uji F diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa variabel X1 (Pajak Daerah), X2 (Retribusi Daerah) dan X3 (PDRB) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y (PAD). PAD 22 Kecamatan di Kabupaten pada tahun 2018-2022 .

5. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai masukan :

1. Pemerintah daerah harus menerapkan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan daerah, agar pemerintah daerah tidak harus bergantung terhadap pemerintah pusat.
2. Dalam penelitian Pajak Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus mengintensifkan peningkatan pengawasan wajib pajak bagi penduduk yang berada pada umur produktif dan sudah bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan situasi yang kondusif
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menjadikan PAD menjadi sumber utama belanja daerah, karena PAD merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya yang tercermin dari adanya ekonomi daerah

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan). Karena dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
5. Pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari PDRB (Product Domestic Regional Bruto) secara akurat dan merata kedalam lapisan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, A., Yeti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 58-69.
- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SORONG. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 727-737.
- Azhar, I. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164-174.
- Batik, K. (2013). ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PDRB, JUMLAH PENDUDUK, PENERIMAAN PEMBANGUNAN, DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 115-140.
- Dahrani, R. Dan. (2021). *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*
- Damaiyanti, N. D., & Setiawan, I. E. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PBB TERHADAP PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 97-105.
- Dewi, D. L., Indrawati, L. R., & Septiani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *DINAMIC*, 2(3), 63-70.
- Fadli, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2), 62-73.

- Fitriani Saragih, R. D. H. & S. S. (2023). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 73-81
- Handayani, A. T., Suryati, T., Maarsela, H. A., Ljqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sorot*, 17(1).
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Horota, P., Riani, I. A., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1-33.
- Januri, & Hanum, Z. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tas Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.
- Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Negara (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 157-174.
- Juwita, R., & Wilda, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, 3(1), 69-76.
- Kapang, S., Rorong, I. P., & Maramis, M. T. (2019). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 84-94.
- Kuncoro, M. (2015). *Indikator Ekonomy*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1-16.

- Mamondol, M. R. (2014). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Poso. *Jurnal Riset Unkrit*, 3(2), 1-10.
- Marliyanti, D. S., & Arka, S. (2014). Pengaruh Pdrb Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ep Unud*, 3(6), 265-271.
- Mesra, B. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Tools*, 53(9), 1689-1699.
- Murib, D. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Pdrb Terhadap Pad Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 23-33.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jekp*, 5(2), 89-104.
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 4(1), 74-86.
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dekat*, 1(1), 37-56.
- Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018. *Diponegoror Journal Of Economics*, 10(2), 1-10.
- Ramdani, D., Darmansyah, & Ahmar, N. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 312-326.
- Raudhatinur, & Ningsih, E. S. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 4(3), 441-455.

Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9-18.

Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta.

Sinambela, E, & Pohan, K, R, A. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 1-18.

Sinambela, L. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*. Jakarta: Indeks.

Triani, & Kuntari, Y. (2010). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Aset*, 12(1).